

## TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP SUAKA PERIKANAN (RESERVAT) LUBUK KASAI PERAIRAN BATANG PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Harizon<sup>1\*</sup> Rini Hertati<sup>2</sup> Muhammad Natsir Kholis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan,  
Universitas Muara Bungo-Jambi  
<sup>2</sup>Staf Pengajar Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan,  
Universitas Muara Bungo-Jambi  
\*Email: rinihertati4@gmail.com

### ABSTRAK

Kabupaten Bungo memiliki wilayah konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem yang disebut suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai, wilayah ini merupakan daerah aliran sungai batang pelepat. Penelitian dilaksanakan bulan November-Desember 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan alternatif strategi terhadap keberadaan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di Perairan Sungai Batang Pelepat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai yaitu sebesar 41,30 % (kategori sedang) dan alternatif strategi yang dipilih yaitu strategi SO dengan partisipasi masyarakat yang baik dan akses jalan yang lancar akan menambahkan nilai ekonomis serta berpeluang untuk dijadikan tempat ekowisata perairan berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Jambi, Kabupaten Bungo, Konservat, Konservasi, SWOT

### I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat pengelolaan sumberdaya ikan yang efektif, salah satunya sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk berkembang biak dengan baik, yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan PP. No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya

secara berkelanjutan (PP No. 60 Tahun 2007). Menurut Indrawan, Primack dan Supriatna (2012) yang sering mengancam pelestarian ikan dan avertebrata perairan adalah bendungan, polusi, proyek irigasi, invasi spesies asing, dan kerusakan habitat pada umumnya.

Di Indonesia, penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak (racun, sentrum dan bom) semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan,

yaitu dengan melakukan pengembangan Lubuk Larangan sebagai bentuk upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lubuk larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai (Supriatna, 2013). Dengan sistem panen ikan Lubuk larangan yang membatasi penggunaan alat tangkap dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan. Lubuk larangan juga merupakan salah satu kearifan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya.

Selain itu masyarakat Kabupaten Bungo juga memiliki wilayah konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem yang disebut suaka perikanan (reservat). Reservat merupakan wilayah perairan umum

daratan baik berupa danau, rawa, sungai, atau genangan air lainnya yang dilarang untuk melakukan aktivitas penangkapan ataupun budidaya ikan, yang merupakan wilayah dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Saat ini di Kabupaten Bungo telah terbentuk sebanyak 7 kawasan reservat. (Disnakan Kabupaten Bungo, 2015). Lokasi suaka perikanan (reservat) di perairan batang pelepat terletak di Dusun Koto Jayo, dengan luas kawasan 13,025 Ha dari luasan sungai keseluruhan 325 Ha (Disnakan Kabupaten Bungo, 2015). Keberadaan suaka perikanan (reservat) di sungai Batang Pelepat sudah berkembang pesat, namun terbentuknya reservat tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan alternatif strategi terhadap keberadaan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di Perairan Sungai Batang Pelepat Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2018. Penelitian dilakukan di suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. (Gambar 1).

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung ke lapangan dengan teknik pengambilan data secara *simple random sampling*. Sumber data terdiri dari data primer

dan didukung data sekunder. Data primer yaitu data dari hasil survei seperti pengamatan di lapangan, kuisisioner dan hasil wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder diambil dengan cara menelaah laporan atau tulisan yang relevan dari Dinas Perikanan, BPS dan Kecamatan atau pendapat *stakeholder* yang berasal dari masyarakat/nelayan, tokoh masyarakat lokal, perangkat dusun, serta pengelola suaka perikanan (reservat).

## Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan gejala yang ada di lokasi penelitian. Perhitungan tingkat partisipasi menggunakan persentase berdasarkan pembagian total nilai partisipasi di bagi jumlah responden dikali dengan 100 %. Nilai partisipasi kurang dari 2340 < dapat dikatakan rendah, jika nilai 2340 sampai dengan 4275 di kategorikan sedang dan jika nilai lebih dari > 4275 di kategorikan tinggi.

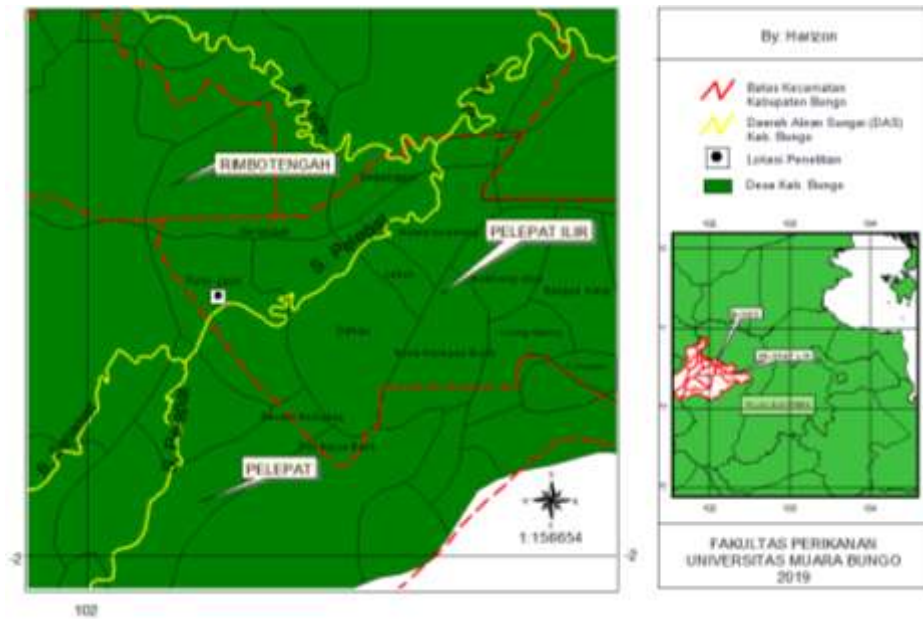
### 2. Analisis SWOT

Analisis ini digunakan untuk menentukan alternatif strategi terhadap keberadaan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di Perairan Sungai Batang Pelepat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) yaitu analisis yang membandingkan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Menurut Freddy (2006), Sebelum merumuskan strategi, terlebih dahulu kita analisa kasus yang didalamnya menjelaskan situasi dan informasi yang ada, terkait dengan objek yang kita teliti. Tahapan dalam analisis kasus adalah sebagai berikut: Tahap 1) pemahaman mengenai situasi dan informasi yang ada (keberadaan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di Perairan Sungai Batang Pelepat Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Propinsi Jambi); Tahap 2) pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi. Baik

masalah yang bersifat umum maupun spesifik; Tahap 3) menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah; Tahap 4) Evaluasi pilihan alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Setelah itu barulah melakukan pembobotan, rating dan skor sehingga dapat mengetahui skor SWOT dan memilih alternatif strategi. Pembobotan masing-masing faktor strategis dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00.

Pemberian rating pada masing-masing faktor dengan skala mulai dari 10 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut variabel yang dianalisis. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari 6 sampai dengan 10 dengan membandingkan terhadap rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya jika kelemahan besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai kelemahan rendah/di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 5. Selanjutnya kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) sampai dengan 1,0 (lemah). Terakhir jumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor bobot faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana variabel yang di analisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internal dan eksternal (Rangkuti, 2019).



Gambar 1. Peta lokasi Penelitian

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Potensi Perikanan di Kecamatan Pelepat Ilir

Sungai Batang Pelepat merupakan salah satu dari lima sungai utama yang ada di Kabupaten Bungo, dengan panjang sungai 50 km lebar rata-rata 65 m melintasi Kecamatan Pelepat Ilir bagian utara melalui 5 desa yaitu Desa Muara Kuamang, Desa Lubuk, Desa Danau, Desa Koto Jayo dan Desa Padang Pelangeh, sedangkan lokasi Suaka Perikanan terletak di Desa Koto Jayo, dengan luas kawasan 13,025 Ha dari luasan sungai keseluruhan 325 Ha.

Kecamatan Pelepat ilir memiliki sumberdaya yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Luas lahan untuk budidaya ikan di kolam/tambak 39 Ha, rawa-rawa 921 Ha, sedangkan untuk penangkapan ikan di perairan umum khususnya di Sungai Batang Pelepat sangat potensi sekali, hal ini dikarenakan panjang sungai sekitar 50 km atau dengan luas 325 Ha, disamping itu Sungai

Batang Pelepat terdapat pula Kawasan Suaka Perikanan dengan luas adalah 130.250 m<sup>2</sup> atau 13,025 Ha (Disnakan Kabupaten Bungo, 2010).

Sungai Batang Pelepat melintasi beberapa desa antara lain desa Koto Jayo, Desa Danau, Desa Padang Pelangeh, Desa Lubuk dan Desa Muara Kuamang dengan jumlah nelayan sebanyak 270 RTP, sedangkan jenis alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan masih bersifat tradisional sebanyak 8.655 unit terdiri dari jaring hanyat 180 unit, rawai tetap 1.950 unit, pancing 6.375 unit dan jala tebar 150 unit.

Jenis ikan yang ada pada sungai Batang Pelepat saat ini antara lain ; *Mystus nemurus*, *Macrones nigriceps*, *Criptoferus limpok*, *Thinnichthys thynnoides*, *Osteochilus hasselti*, *Puntius schwanefeldi* , *Mickrophis brachurus*, *Pristolepis grooti*, *Osphronemus gouramy* , *Oxyeleotris marmorata* (Disnakan Kabupaten Bungo, 2010).

#### Sejarah Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan memberikan nuansa baru bagi pembangunan daerah, sehingga upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah termasuk potensi sumberdaya di wilayah perairan umum mulai mendapat perhatian, khususnya dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat terutama rumah tangga perikanan.

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan terutama terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan habitatnya, perlu dilakukan upaya pelestarian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pada pasal 2 mengenai ketentuan pengelolaan perikanan yang diantaranya berdasarkan atas azas kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keberadaan lubuk larangan merupakan salah satu wujud upaya konservasi sumberdaya perikanan yang memiliki peranan penting bagi masyarakat. Tata cara pembentukan kawasan konservasi itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang konservasi sumber daya ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Keberadaan suaka perikanan secara hukum dijamin berdasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sedangkan tata

cara penetapan kawasan konservasi perairan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009.

Berdasarkan tujuan pengelolaan, suaka perikanan memiliki kriteria :

- a. Tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. Memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
- c. Memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

Sejak diberlakukannya kawasan Suaka Perikanan di daerah, siapa saja dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidyaan ikan menggunakan peralatan yang dapat membahayakan ikan dan lingkungan. Selain itu, juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya seperti meracuni (tuba) dan menyentrum dengan arus listrik, kecuali untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Menghidupkan kembali budaya lubuk larangan dengan pembaruan sistem pengelolaan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Bupati Bungo telah membuat payung hukum untuk melegalisasi dan melindungi kegiatan praktek lubuk larangan ini dengan SK Bupati Nomor 53 Tahun 2013 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (Reservat) Lubuk Kasai di Dusun Koto Jayo Kecamatan Pelapat Iir Kabupaten Bungo. Hal ini membuat pengelolaan lubuk larangan agak berbeda dengan sebelumnya, lebih

rasional, terorganisir dengan baik, memiliki aturan-aturan, dan ada sanksi-sanksi berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh musyawarah bersama desa. Maka menguatlah kedaulatan komunitas untuk menentukan dan mengelola sumberdaya yang mereka miliki untuk kepentingan bersama.

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai**

Tingkat partisipasi masyarakat dengan melibatkan 95 responden terdiri dari tokoh masyarakat, pengelola reservat, masyarakat perikanan dan masyarakat umum menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di empat dusun yang berada di kawasan suaka perikanan (reservat) lubuk kasai pada kategori sedang dengan nilai 3924 (41,30%). Hasil ini juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami istilah kawasan suaka perikanan (reservat), keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah baik, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong cukup. Menurut Aulia *et al.*, (2017) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah karang jeruk di Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan umum dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan karang jeruk sebagian besar termasuk dalam kategori rendah sedangkan tingkat partisipasi masyarakat POKMAWAS dalam pengelolaan konservasi dalam kategori sedang. Namun jika dilihat dari keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan I (Penguatan Kelembagaan) dan pengelolaan II (penguatan

sumberdaya kawasan) termasuk dalam kategori rendah.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian konservasi perairan dan lingkungan masih rendah, disebabkan oleh faktor informal, teknologi dan keterampilan. Keberhasilan pengelolaan pelestarian lingkungan banyak tergantung pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sekitarnya (MacKinnon, 1996); (Sumual, 1997).

Menurut Rahayu *et al.*, (2018) bahwa tingkat partisipasi masyarakat di tiga Desa/Stasiun yang berada di kawasan Perairan DAM Betuk terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan DAM Betuk yang melibatkan 98 Responden pada kategori tinggi, dengan nilai 5469 (55,8%). Hasil analisis SWOT dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) alternatif strategi yang merupakan hasil analisis SWOT. Pendekatan terhadap masyarakat pengelola, masyarakat umum dan pemangku kepentingan menjadi alternatif strategi utama untuk meningkatkan pengelolaan organisasi pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA), agar maju dan berkembang, serta mandiri dan berkesinambungan.

Ciri-ciri dan sifat pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat antara lain: 1) pengelolaan sumberdaya alam cenderung berkelanjutan, 2) struktur pihak yang terlibat sederhana, hal ini dapat mempermudah dalam penerapan kebijakan atau program di lapangan mudah dilaksanakan, 3) bentuk pemanfaatan yang terbatas dan termasuk skala kecil, 4) tipe masyarakat dan kegiatannya relatif

homogen, karena komponen pengelolaannya berasal dari masyarakat itu sendiri, dan 5) rasa kepemilikan dan ketergantungan

### Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, pengamatan kondisi internal dari suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai melalui

terhadap sumberdaya alam tinggi (Kusumastanto *et al.*,1998).

### Strategi Pengelolaan Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai

kuisisioner dan wawancara dengan masyarakat di dapatkan beberapa indikator. Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) (Tabel 1).

Tabel 1. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor-faktor StrategisInternal		Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan (S)</b>				
S1	Sebagian besar masyarakat memahami istilah Suaka Perikanan	0,05	8	0.4
S2	Tingginya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gotong royong dan penangkapan.	0,21	8	1.68
S3	Nilai ekonomis pendapatan terhadap keberadaan Suaka Perikanan	0,05	8	0.04
S4	Tingkat konflik terhadap keberadaan suaka perikanan rendah	0,05	10	0.5
S5	Keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah cukup baik	0.04	10	0.4
<b>Kelemahan (W)</b>				
W1	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam organisasi perencanaan dan diskusi	0,16	4	0.64
W2	Eksplorasi hasil suaka perikan yang berlebihan	0,05	4	0.15
W3	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam melestarikan suaka perikanan	0,04	3	0.16
Jumlah Skor		0,65		4,33

Analisis ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan strategi pengelolaan suaka perikanan (reservat).

#### 1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Sebagian besar masyarakat memahami istilah suaka perikanan
- b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gotong-royong dan penangkapan ikan.

c. Nilai ekonomis pendapatan terhadap keberadaan suaka perikanan cukup tinggi

d. Keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah cukup baik

#### 2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam organisasi perencanaan dan diskusi

b. Eksplorasi hasil suaka perikan yang berlebihan

- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan suaka perikanan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor kekuatan tertinggi yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gotong royong dan penangkapan ikan dengan skor (1,68) dan skor terendah sebagian besar masyarakat memahami istilah suaka perikanan dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah cukup baik dengan skor (0,4).

Pemahaman masyarakat tentang suaka perikanan ini tidak lain peran pemerintah dusun dan pemerintah daerah beserta kelompok pengawas yang selalu memberikan pemahaman-pemahaman tentang arti pentingnya pengelolaan suaka perikanan. Pemahaman tentang istilah kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai sudah cukup dimengerti oleh masyarakat di sekitar kawasan suaka perikanan (reservat), masyarakat dituntut untuk selalu menjaga dan memelihara ekosistem di kawasan suaka perikanan (reservat) serta adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemerintah dusun.

Menurut Salm *et al.*, (2000) pengelolaan kawasan konservasi perlu diketahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan terhadap keberadaan fungsi tersebut, karena masyarakat yang memiliki persepsi yang benar akan berperilaku positif terhadap upaya-upaya konservasi.

Keberhasilan dari pengelolaan konservasi juga tergantung dari dukungan masyarakat setempat. Dukungan masyarakat merupakan tanda bahwa masyarakat setempat

peduli terhadap konservasi, yang mendorong mereka untuk mentaati peraturan kawasan konservasi oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah

Partisipasi masyarakat cukup baik dalam pengelolaan, hal itu dapat dilihat dengan hasil tangkapan berada pada zona ekonomi dan termasuk wilayah pendapatan terbesar dari perikanan. Ikan-ikan yang hidup di suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di berikan perawatan dan pemeliharaan khusus, ikan dapat berkembangbiak secara alami.

Keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah cukup baik sehingga keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai upaya konservasi perairan program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat sekitar suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai. Tingkat konflik di kawasan pengelolaan suaka perikanan (reservat) masih bisa diatasi oleh pengelola, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat melalui hukum adat maupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga eksistensi suaka perikanan (reservat) tetap terjaga sampai masa yang akan datang.

Menurut Sahide (2013) pemberian akses kepada masyarakat akan membuat masyarakat merasakan manfaat dari kawasan konservasi dan mengurangi konflik antara pihak konservasi perikanan (reservat) dengan masyarakat sekitar. Dengan pemberian akses tersebut, masyarakat akan mempunyai rasa memiliki keberadaan kawasan konservasi sehingga masyarakat sukarela menjaga kelestarian kawasan konservasi perikanan (reservat).



Fakta empiris menunjukkan bahwa konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam interaksinya satu dengan yang lain. Konflik dapat dijumpai pada setiap sistem sosial dari yang terkecil, seperti: antar individu, antar kelompok bahkan sampai yang terbesar antar bangsa (Kinseng, 2014); (Kholis *et al.*, 2018).

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor kelemahan tertinggi yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap organisasi perencanaan dan diskusi dengan skor (0,64) dan skor terendah kelemahan pada eksploitasi hasil suaka perikanan yang berlebihan dengan skor (0,15).

Eksploitasi berlebihan di sekitar suaka perikanan dapat ditekan tetapi pendapatan hasil penangkapan ikan disekitar kawasan suaka perikanan (reservat) relatif menurun, hal itu diduga disebabkan sempitnya wilayah tangkapan dan eksploitasi secara ilegal. Keterlibatan masyarakat dalam organisasi perencanaan serta diskusi berdasarkan hasil penelitian dalam kategori cukup, namun masih perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat dapat ikut merencanakan serta diskusi dalam pengelolaan kawasan suaka perikanan (reservat) sehingga tidak ada lagi persepsi masyarakat bahwa pembentukan pengurus

organisasi hanya untuk kepentingan suatu golongan saja.

Indikator kualitas program pengelolaan suaka perikanan yang berpotensi mempengaruhi kemampuan organisasi masyarakat dalam pendekatan komunikasi program. Menurut Greenhalgh *et al.*, (2006) bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan memerlukan situasi komunikasi yang ideal di mana warga dapat saling berdialog tanpa tekanan dan memiliki peluang yang sama untuk diterima pendapatnya didepan umum.

Kebijakan yang bisa digunakan untuk mendorong tingkat partisipasi pengelolaan perikanan dari kondisi *open access* yang cenderung dimanfaatkan secara tidak lestari ke kondisi pengelolaan optimal dan lestari adalah perizinan yang merupakan satu bentuk regulasi perikanan yang paling umum dan sederhana dan regulasi dan kebijakan melalui instrument ekonomi (Fauzi, 2007).

### Faktor Eksternal

Hasil pengamatan kondisi eksternal dari kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai di peroleh beberapa indikator. Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks *Eksternal Factor Evaluation* (EFE) (Tabel 2).

Tabel 2. Matriks *Eksternal Factor Evaluation* (EFE)

Faktor-faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang (O)</b>				
O1	Suaka perikanan sebagai tempat ekowisata	0,25	8	2
O2	Kerja sama antara pemerintah maupun pihak swasta	0,05	8	0,4
O3	Akses jalan menuju lokasi suaka perikanan	0,05	10	0,5
<b>Ancaman (T)</b>				
T1	Kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap keberadaan suaka perikanan	0,04	4	0.6

T2	Kurangnya anggaran dana serta tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat	0,05	4	0,2
Jumlah Skor		0,44		3,26

Analisis ini digunakan untuk menentukan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) strategi pengelolaan suaka perikanan (reservat).

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Suaka perikanan sebagai tempat ekowisata perairan.
- b. Kerja sama antara pemerintah maupun pihak swasta.
- c. Akses jalan menuju lokasi suaka perikanan.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap keberadaan suaka perikanan
- b. Tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor peluang tertinggi yaitu Suaka perikanan sebagai tempat ekowisata dengan skor (2) dan skor terendah peluang pada Kerja sama antara pemerintah maupun pihak swasta dengan skor (0,4).

Kawasan sungai Batang Pelepat juga terdapat beberapa tempat bersantai karena kawasan suaka perikanan (reservat) tidak begitu jauh dengan jalan sehingga masyarakat yang melintasi jalan tersebut dapat singgah dan melihat-lihat biota dan tumbuhan yang terdapat disekitar kawasan suaka perikanan (Reservat).

Faktor peluang dapat dimanfaatkan dengan manajemen pengelolaan yang baik, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkompeten, menyatukan pandangan untuk

menata dan mengelola potensi kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai potensi ekowisata, sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mengembangkan kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai ekowisata berbasis kearifan lokal. Masyarakat perlu menjalin komunikasi/ kerjasama bersama pemerintah dusun maupun pemerintah daerah pemerintah serta semua pihak yang ikut serta dalam pengelolaan kawasan suaka perikanan (reservat).

Menurut Setiawan *et al.*, (2013) menyatakan bahwa suatu daerah yang mata pencaharian pelaku pada sektor perikanan jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan di daerah tersebut.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa faktor yang memiliki skor ancaman tertinggi yaitu kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap keberadaan suaka perikanan dengan skor (0,6) dan skor terendah ancaman pada kurangnya anggaran dana serta tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat dengan skor (0,2).

Ancaman terhadap kurangnya publikasi tentang keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai yaitu belum banyak diketahui masyarakat luas, sehingga tidak menjadi populer dikalangan masyarakat. Masalah serius lainnya yang menjadi ancaman di kawasan suaka perikanan (reservat) yaitu degradasi lingkungan seperti pencemaran perairan akibat penambang emas tanpa izin (PETI)

atau abrasi. Kurangnya anggaran dana juga menjadi ancaman serius karena reparasi terhadap kawasan perlu kebaruan dan penataan, sehingga membutuhkan pendanaan.

Menurut Sahide *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan biaya yang besar dan seringkali pengelolaan kawasan konservasi menjadi terhambat di Indonesia disebabkan oleh tiadanya pendanaan berkelanjutan.

### **Alternatif Strategi Pengelolaan**

Hasil analisis faktor internal dan eksternal dapat digambarkan sebuah alternatif strategi untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan suaka perikanan (reservat) yang disajikan dalam bentuk matriks SWOT. Matriks SWOT tersebut dapat dilihat pada (Tabel 3).

Berdasarkan hasil matriks SWOT (Tabel 3) dapat dijelaskan bahwa alternatif strategi yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Strategi Kekuatan (S) – Peluang (O): menggunakan seluruh kekuatan untuk memaksimalkan peluang, tingkat partisipasi masyarakat yang baik merupakan kekuatan sedangkan akses jalan yang lancar merupakan peluang, maka strategi yang harus dilakukan adalah memaksimalkan peluang kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai tempat ekowisata perairan yang berbasis kearifan lokal yang menjadi nilai tambah ekonomis masyarakat sekitar kawasan suaka perikanan (reservat).
- 2) Strategi Kekuatan (S) – Ancaman (T): menggunakan seluruh kekuatan untuk mengatasi ancaman, keikutsertaan

masyarakat dalam program pemerintah dan bantuan yang di peroleh dari pemerintah merupakan kekuatan sedangkan kurangnya publikasi, kurangnya anggaran dana dan kurangnya penerapan pelatihan tentang konservasi perairan merupakan ancaman, alternatif strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat umum, pihak swasta dan pemerintah dengan cara melakukan publikasi pelatihan tentang konservasi perairan.

- 3) Strategi Kelemahan (W) - Peluang (O): menghindari kelemahan untuk memaksimalkan peluang, kebiasaan masyarakat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta membuang sampah ke perairan Batang Pelepat merupakan kelemahan sedangkan kelestarian lingkungan sungai merupakan peluang bagi semua biota air yang di sungai untuk tumbuh dan berkembangbiak, maka alternatif strategi yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan Penambangan Emas tanpa Izin (PETI) serta tidak membuang sampah ke perairan sungai.
- 4) Strategi Kelemahan (W) – Ancaman (T) : menghindari kelemahan untuk meminimalkan ancaman, rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam organisasi pengelolaan Kawasan Konservasi Perikanan (Reservat) merupakan kelemahan, sedangkan kurangnya publikasi sehingga informasi yang diterima masyarakat sering keliru dalam menanggapi keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai upaya konservasi merupakan

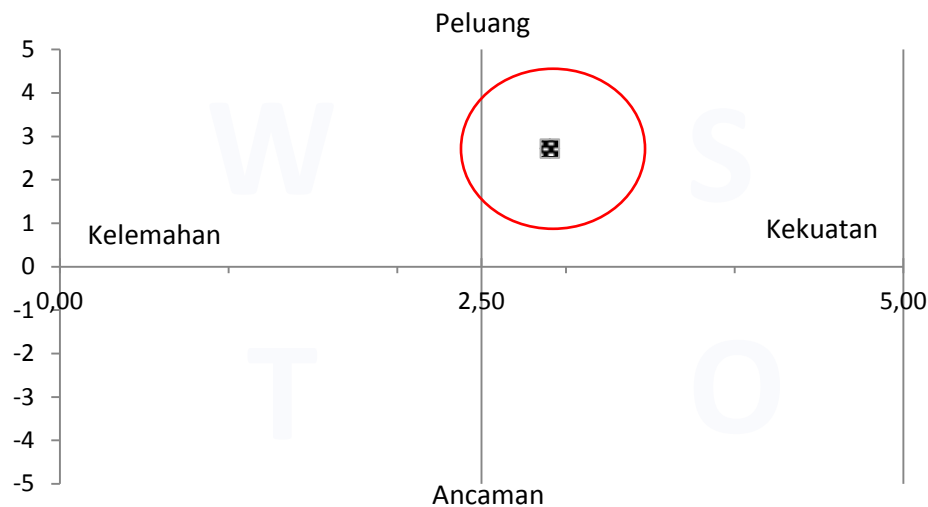
ancaman, maka alternatif strategi yang harus dilakukan adalah perlunya dukungan pemerintah dalam hal ini petugas penyuluh lapangan sebagai mediasi untuk melakukan penguatan organisasi pengelolaan Kawasan Konservasi Perikanan (Reservat)

agar pengelolaan dapat efektif dan efisien.

Penentuan strategi terpilih terlebih dahulu mengetahui kuadran SWOT atau posisi strategi yang akan dipilih. Kuadran SWOT dapat dilihat pada (Gambar 2).

Tabel 3. Matriks SWOT Pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai

<b>Internal</b>	<b>S</b>	<b>W</b>
<b>Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman suaka perikanan</li> <li>• Keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah</li> <li>• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, gotong royong</li> <li>• Nilai ekonomis pendapatan terhadap keberadaan suaka perikanan</li> <li>• Tingkat konflik rendah. sosialisasi dan penerapan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam organisasi, perencanaan diskusi kurang baik</li> <li>• Eksploitasi di sekitar suaka perikanan berlebihan</li> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan</li> </ul>
	<b>O</b>	<b>Strategi S – O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suaka perikanan sebagai tempat ekowisata perairan</li> <li>• Kerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta</li> <li>• Akses menuju suaka perikanan</li> </ul>	Partisipasi masyarakat yang baik dan akses yang lancar akan menambah nilai ekonomis serta berpeluang suaka perikanan Lubuk Kasai di jadikan tempat ekowisata perairan.	Pengelola sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai dan melakukan penambangan illegal di perairan sekitar suaka perikanan untuk menjaga pelestarian lingkungan
<b>T</b>	<b>Strategi S – T</b>	<b>Strategi W – T</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya publikasi suaka perikanan</li> <li>• Kurangnya anggaran dana dan tidak adanya pelatihan tentang konservasi perairan kepada masyarakat</li> </ul>	Tingkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta gunakan sebagian dari alokasi pemerintah untuk melakukan publikasi serta pelatihan tentang konservasi perairan di suaka perikanan.	Perlunya dukungan pemerintah melakukan penguatan organisasi pengelolaan suaka perikanan agar pengelolaan suaka perikanan berjalan secara efektif dan efisien



Gambar 2. Kuadran SWOT Pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai

Gambar 2 menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk digunakan berada pada kekuatan yang dimiliki, dengan memaksimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki maka kawasan suaka perikanan (reservat) dapat dikembangkan menjadi tempat ekowisata perairan yang berbasis kearifan lokal. Menurut Karsudi (2010) untuk mengembangkan daerah yang belum berpotensi menjadi daerah berpotensi sebagai obyek daya tarik wisata, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut : (1) melakukan usaha promosi dan pemasaran guna menarik potensi pasar, (2) memperkecil kendala aksesibilitas melalui penyediaan sarana prasarana modal transportasi, (3) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan sesuai standar pelayanan, (4) melakukan pemenuhan terhadap standar akomodasi yang diperlukan, (5) meningkatkan diversifikasi atraksi wisata.

Empat strategi yang telah dijelaskan pada matriks SWOT (Tabel 3) tidaklah mungkin semua strategi mampu dijalankan dalam waktu cepat dan bersamaan. Untuk

itu maka perlu pemilihan alternatif strategi pilihan yang diprioritaskan. Strategi prioritas program kerja pengelolaan kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai sebagai upaya konservasi dapat dilihat pada (Tabel 4). Tabel 4 menunjukkan bahwa alternatif strategi terpilih yaitu strategi SO dengan skor (2,5), artinya menggunakan seluruh kekuatan untuk memaksimalkan peluang dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik dan akses jalan yang lancar. Hal itu akan menambah nilai ekonomis serta berpeluang suaka perikanan Lubuk Kasai di jadikan tempat ekowisata perairan. Langkah yang harus dilakukan masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan peluang kawasan suaka perikanan (reservat) sebagai kawasan ekowisata perairan yang berbasis kearifan lokal, serta mengoptimalkan manajemen pengalokasian bantuan dana untuk kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat).

Menurut Antoko (2016) strategi kebijakan disektor kelautan

dan perikanan Provinsi Lampung menghasilkan kombinasi IFAS-EFAS pada strategi dan kebijakan dengan cara merumuskan tiap-tiap kombinasi matrik SWOT. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan peluang merupakan sektor unggulan yang dapat dijadikan nilai positif dalam mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Propinsi Lampung.

Penerapan implementasi strategi konservasi sedikit sensitif dan cukup mudah terpengaruh oleh perubahan pencapaian kriteria pengelolaan yang diintervensi atau diinginkan oleh *stakeholders*. Dengan

demikian strategi konservasi perlu pengawasan dan dukungan dari semua pihak, untuk mewujudkan pengelolaan usaha penangkapan yang berkelanjutan. Sensitivitas opsi kebijakan pengembangan perikanan tangkap terkait kriteria pengelolaan yang ada sangat dibutuhkan untuk memberi arahan bagi implementasinya di lokasi yang diamati. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan terutama nelayan kecil untuk efisiensi pembiayaan menangkap ikan (Malanesia, 2008); (Kholis *et al.*, 2018).

Tabel 4. *Matriks Strategy Factor Analysis Summary (SFAS) Pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai*

No	SFAS	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
<b>Strategi (SO)</b>					
1	Partisipasi masyarakat yang baik dan akses yang lancar akan menambah nilai ekonomis serta berpeluang suaka perikanan Lubuk Kasai di jadikan tempat ekowisata perairan	0.25	10	2.5	1
<b>Strategi (ST)</b>					
2	Pengelola sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai dan melakukan penambangan illegal di perairan sekitar suaka perikanan untuk menjaga pelestarian lingkungan	0.15	8	1.2	2
<b>Strategi (WO)</b>					
3	Tingkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta gunakan sebagian dari alokasi pemerintah untuk melakukan publikasi serta pelatihan tentan konservasi perairan di suaka perikanan	0.04	7	0.28	4
<b>Strategi (WT)</b>					
4	Perlunya dukungan pemerintah melakukan pengukuhan organisasi pengelolaan suaka perikanan agar pengelolaan suaka perikanan berjalan secara efektif dan efisien	0.05	8	0.4	3
Jumlah Skor		0.49		4.38	

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan kawasan suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai yaitu sebesar 41,30 % (kategori sedang) dan alternatif strategi yang dipilih yaitu strategi SO dengan partisipasi masyarakat yang baik dan akses jalan yang lancar akan menambahkan nilai ekonomis serta berpeluang untuk

dijadikan tempat ekowisata perairan berbasis kearifan lokal.

### Saran

Sebagai saran pada penelitian ini diharapkan adanya sosialisasi menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai program-program pemerintah khususnya tentang konservasi sumberdaya perairan di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antoko, A. R. (2016). Analisis Strategi dan Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung.
- Aulia, F. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Karang Jeruk Di Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Disnakan, (2010). Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, Muara Bungo.
- Fauzi, A. (2010). Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Freddy, R. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Greenhalgh, S., Schwartz, R., Van Tassel, R., & Molz, T. (2006). U.S. Patent Application No. 11/460,911.
- Indrawan, M. R. Primack dan J. Supriatna. 2012. Biologi Konservasi. Yayasan Obor. Jakarta.
- Karsudi, K., Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010). Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 16(2), 92-100.
- Kholis, M. N., Wahju, R. I., & Mustaruddin, M. (2018). Prioritas Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan Kurau di Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 2(3).
- Kinseng RA. 2014. Konflik Nelayan. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 273 hlm.
- KKP, K. (2014). Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
- Kusumastanto, T., & Jolly, C. M. (1997). Demand analysis for fish in Indonesia. Applied Economics, 29(1), 95-100.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., & Mangalik, A. (1996). The ecology of Indonesia series, volume III: the ecology

- of Kalimantan. Periplus Editions, Hong Kong.
- Malanesia M. 2008. "Sensitivitas Opsi Pengembangan Unit Penangkapan Ikan Terpilih di Kabupaten Lampung Selatan". *Bul PSP*. 17(1):88-110.
- No, P. P. (60). Tahun 2007 Tentang Kawasan Konservasi Perairan.
- Rahayu, S., Hertati, R., & Djunaidi, D. (2018). Studi Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Keramba Jaring Apung di Perairan Dam Betuk Kabupaten Merangin. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 2(3).
- Rangkuti, F. (2019). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI.
- Sahide, M. A. K. (2013). Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng.
- Salm, R. V., Salm, R. V., Clark, J. R., & Siirila, E. (2000). *Marine and coastal protected areas: a guide for planners and managers*. IUCN.
- Setiawan, A. A., Emilia, I., & Suheryanto, S. (2015). Kandungan Merkuri Total pada berbagai jenis ikan Cat Fish di Perairan Sungai Musi Kota Palembang. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*.
- Sumual, H. (1997). Pengaruh Informasi Teknologi Dan Keterampilan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Konservasi Cagar Alam Gunung Tangkoko Dua Sudara di Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian IKIP Manado*, 2, 15-23.
- Supriatna, J. (2013). *Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-ilmu Kepribumian dalam Pelestarian Alam*. Research Center of Climate Change, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang. (45) Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia.